

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya dunia perusahaan, tanggung jawab perusahaan juga dituntut untuk melihat lebih luas, tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan finansial namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan perusahaan. Keberlangsungan suatu perusahaan tidak lagi hanya didukung dari aspek ekonomi saja seperti memfokuskan tujuan perusahaan yang berorientasi hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun juga harus didukung oleh aspek sosial yaitu untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi perusahaan itu sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya sehingga apabila terjadi ketidak seimbangan, maka besar kemungkinan terjadinya konflik antara perusahaan masyarakat luas yang kemudian akan menghambat keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang.

Keharmonisan hubungan antara perusahaan, sosial dan lingkungan juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dimana perusahaan dituntut untuk dapat membawa perubahan kearah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Oleh karena itu perusahaan perbankan dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena perusahaan perbankan memiliki aktivitas bisnis yang sedikit berbeda dari sektor industri yang lain. Perusahaan perbankan memiliki proses bisnis yang tidak berdampak langsung terhadap sosial dan lingkungan, namun perusahaan perbankan memiliki dampak tidak langsung pada sosial dan lingkungan melalui proyek keuangan mereka dan perusahaan perbankan ini merupakan salah satu pemeran penting dalam perekonomian negara dan dilihat dari kegiatan

masyarakat sekarang yang tidak terlepas dari fasilitas jasa perbankan membuat perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor usaha yang paling diharapkan memiliki prospek yang baik dimasa depan, hal inilah yang mendorong perusahaan perbankan untuk melakukan CSR. Fungsi utama bank yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi pendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Meskipun bergerak dalam industri keuangan namun perusahaan perbankan juga dapat memiliki dampak terhadap lingkungan seperti tingginya penggunaan kertas yang kini mulai menjadi perhatian serius dengan diterapkannya sistem *paperless* pada beberapa bank yaitu dengan memberikan fasilitas layanan *e-channel* kepada nasabah seperti ATM, *Cash Deposito Mechine* (CDM), *Internet Banking*, *Cash Management*, *SMS Banking*, dan *Mobile Banking* dalam rangka penghematan penggunaan kertas. Perusahaan perbankan juga dapat mempengaruhi sosial dan lingkungan melalui proyek keuangan mereka seperti dalam aktivitas kredit, debitur harus memenuhi persyaratan dokumen berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perjanjian lain sesuai dengan yang tertuan dalam ijin lokasi untuk mendapatkan fasilitas kredit konstruksi, kredit kepemilikan lahan, dan kredit investasi. Dengan aktivitas kredit perusahaan perbankan juga dapat menciptakan sistem seleksi dalam pemberian kredit berdasarkan kinerja lingkungan perusahaan yang dinilai dari pengungkapan *Coorporate Social Responsibility* (CSR)-nya, dengan ini secara tidak langsung bank dapat mendorong perusahaan lain untuk menciptakan praktik bisnis yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. *World Resources Institute* (WRI) menyatakan sistem ini telah diberlakukan di HSBC dimana pinjaman perusahaan akan dihentikan pada perusahaan minyak kelapa sawit dan perusahaan kayu, serta pengolahannya di Indonesia dan Malaysia jika ada kecurigaan bahwa perusahaan yang

bersangkutan turut berkontribusi dalam aktivitas *illegal logging*. Sektor perbankan dianggap sebagai sektor yang memiliki peran krusial dalam memfasilitasi keuangan negara dan mendorong adanya *Coorporate Social Responsibility* (CSR) (Singh *et al.*, 2013). Dengan pemahaman sektor perbankan dalam implementasi dan pengungkapan *Coorporate Social Responsibility* (CSR), perbankan jugamendukung berbagai program pendidikan, budaya dan lingkungan, serta program inisiasi kesehatan (Persefoni Polychronidou *et al.*, 2013).Hal inilah yang mendorong perusahaan perbankan untuk melakukan praktik *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya akan disebut dengan CSR.

Pada perusahaan perbankan sendiri, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan perbankan akan memperngaruhi keberlanjutan perusahaan perbankan tersebut dimasa yang akan datang. Seperti yang tertulis pada pengertian dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992, tentang perbankan. Pada pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak ”. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa tugas utama perusahaan perbankan ialah untuk menghimpun dana dari masyarakat dana menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dari sini jelas dilihat bahwa kegiatan oprasional perbankan tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri, sehingga penting untuk menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai investor dari perusahaan perbankan.

Hubungan antara perusahaan perbankan terhadap masyarakat maupun terhadap para stakeholders tidak selalu berjalan mulus. Seperti krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan hal ini juga berdampak pada perusahaan perbankan dilihat dari menurunnya jumlah masyarakat yang menanamkan

modalnya kebank, hal ini membuat tujuan utama bank untuk menghimpun dana dari masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun perekonomian Indonesia mulai meningkat pasca terjadinya krisis moneter, namun isu mengenai kepercayaan masyarakat dan para stakeholders ini belum selesai karena ternyata masih banyak kasus-kasus perbankan yang bermunculan seperti kasus jatuhnya Bank Century akibat dari penyalahgunaan dana nasabah oleh pemilik bank tersebut. Bukan hanya pada Bank Century saja tetapi masih banyak kasus-kasus lain dari dunia perbankan di Indonesia seperti penggelapan dana nasabah, korupsi, serta penipuan-penipuan lain yang dapat merugikan banyak pihak. Hal-hal seperti ini mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat kesadaran masyarakat dan mampu mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap perusahaan perbankan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat dana modal yang masuk pada bank. Maka perusahaan dituntut untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja melainkan juga turut memperhatikan peran suatu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya atau biasa disebut *Coorporate Social Responsibility* (CSR) karena para stakeholders tidak lagi menilai kualitas suatu perusahaan hanya dari besarnya laba yang dihasilkan saja. Dari sisi perusahaan perbankan dapat dilihat bahwa citra perusahaan merupakan salah satu bentuk penilaian masyarakat dan pemegang kepentingan lainnya. Jika citra perusahaan buruk, maka itu akan menghambat kelancaran operasional dan menghambat upaya peningkatan produktivitas dan profitabilitas (keuntungan) perusahaan, termasuk untuk industri perbankan. Oleh sebab itu perusahaan perbankan sebagai pelaku bisnis tidak dapat menutup mata terhadap situasi dan kondisi tempat dimana perusahaan itu berada. Salah satu cara untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat adalah dengan menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Pengungkapan CSR dalam dunia perbankan memang semestinya sudah menjadi keharusan, mengingat CSR bukan hanya sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi sudah

menjadi suatu kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis, termasuk dalam industri perbankan. Seperti yang dinyatakan oleh Tran (2014) bahwa kegiatan CSR pada sektor perbankan telah menjadi sorotan masyarakat dan menjadi permintaan dari berbagai pihak di dunia. Dalam praktiknya masih banyak perusahaan bank yang tidak melakukan kegiatan CSR dan ada juga yang sudah melaksanakan praktik CSR namun belum melakukannya dengan benar, seperti pelaporan yang sangat singkat, tidak berimbang dan tidak melaporkan isu-isu yang material, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum mengerti bagaimana menciptakan program atau produk yang mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan perusahaan, yang kemudian akan memberikan dampak pada kelangsungan hidup suatu perusahaan begitu juga pada perusahaan perbankan yang akan mendapatkan dukungan dari para stakeholder. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang kemudian akan dibandingkan dengan standar pedoman GRI G4, karena selain dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah, pengungkapan CSR juga dapat mempengaruhi para stakeholder yang menginvestasikan dananya atau menyimpan dananya kebank, maka dari itu suatu perusahaan harus memberikan informasi yang relevan kepada stakeholder mengenai posisi, upaya dan prestasi yang didapat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut melalui pengungkapan CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang baik dan menyumbangkan beberapa sumber daya perusahaan (Kotler dan Nancy, 2005). Dengan melaksanakan kegiatan CSR akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan, keselarasan hubungan masyarakat dan perusahaan ini

akan membantu mengurangi angka kemiskinan negara. Komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial dan lingkungan inilah yang menjadi konsep dasar *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi baik keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985). Komitmen perusahaan dalam melaksanakan, menyajikan dan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat yang diperoleh perusahaan adalah (1) profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin kokoh; (2) meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen; (3) meningkatnya komitmen etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan; (4) menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sekitar karena merasa diperhatikan dan dihargai perusahaan; (5) meningkatnya reputasi, *Corporate Branding*, goodwill (intangible asset) dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lako, 2010: 103).

Diskusi tentang pentingnya sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Saat itulah istilah tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* lahir. Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya Jhon Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington

mengemas CSR kedalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. ¹Dari pemahaman Triple Bottom Line ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama suatu perusahaan tidak lagi untuk mencari keuntungan (*profit*), namun juga harus dapat menjaga kesejahteraan masyarakat banyak termasuk juga untuk menjaga kepentingan ketenagakerjaan (*people*) dan menjamin kelestarian lingkungan hidup (*planet*) karena sering kali kerusakan alam yang terjadi adalah akibat dari ketidak pekaan perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam sebagai salah satu sumber dayanya, dan yang terakhir perusahaan juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dalam hal ini termasuk juga untuk menjaga kepentingan ketenagakerjaan (*people*), terlebih untuk perusahaan perbankan, kesejahteraan masyarakat ini sangat perpenaruh pada keberlangsungan hidup perusahaan melihat kegiatan oprasional perusahaan perbankan yang tidak lepas dari dukungan masyarakat (*people*), maka dari itu dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan.

Dalam teori stakeholder menjelaskan bahwa keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder. Yang dimaksud dengan teori *Stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.²*Stakeholder* adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Nor Hadi, 2011:93). Menurut Kasali (2015) mengklasifikasikan stakeholder kedalam beberapa jenis yaitu : *stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham, *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berasal luar organisasi seperti pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat dan pemerintah, *stakeholders* premier adalah *stakeholders* yang harus

¹ T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol 2, No.2, 2012, hal. 50.

² Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hal. 68.

diperhatikan oleh perusahaan, *stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang kurang penting, sedangkan *stakeholders* marjinal merupakan *stakeholders* yang sering diabaikan oleh perusahaan (Hadi 2011:110).³ Oleh karena itu CSR dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang sebagai sumber informasi penting mengenai keberadaan sumberdaya ekonomi perusahaan guna untuk pengambilan keputusan.

Pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan suatu perusahaan merupakan sara pengkomunikasian antar manajemen dan stakeholder. Dalam teori stakeholder pada CSR pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan stake holdernya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas eusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi (Adam dan McNicholas, 2007). Maka pengungkapan CSR yan baik sangat berpengaruh dalam meningkatkan dukungan stakeholder pada perusahaan yang kemudian berakibat pada peningkatan kerja dan pencapaian laba yang diharapkan perusahaan. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu: 1) Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 2) Dalam era globalisasi yang telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. 4) LSM dan pecita lingkungan makin vocal dalam mengkritik perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.⁴

³ Lindawati dan Marsella Puspita, *Corporate Social Responsibility (CSR): Implikasi Stakeholder dan Legitimacy GAP Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Universitas Macung Malang, Vol.6, No.1, 2015, hal 161.

⁴ Sri Rokhlinasari, *Teori-Teori dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan*, Jurnal kajian ekonomi dan perbankan syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.7, No. 1, 2015, Hal.6.

Teori stakeholder juga erat hubungannya dengan teori legitimasi. Gray *et.al* (1996) dalam Nor (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Maka perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dari tempat perusahaan berada (Deegan, 2004). Menurut Dowling dan Pletter, perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari seluruh *stakeholder* dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan.⁵Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Imam dan Anis (2014:442) juga memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Maka Deegan, *et.al* (2002: 319-320) menyatakan, dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika pihak manajemen menganggap bahwa hal tersebut adalah yang diharapkan oleh komunitas. Dengan begitu sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan masyarakat pengungkapan CSR dalam perusahaan sangat penting untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan legitimasi perusahaan tersebut yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang dan memastikan *going concern* perusahaan.

Berdasarkan kajian tentang teori *stakeholder* dan teori legitimasi, dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Teori

⁵ Edoardus Satya Adhiwardana dan Daljono, *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan*. Dipenogoro Journal of Accounting. Vol.2, No.2, 2013, Hal.2.

stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan teori legitimasi menempatkan posisi persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi.⁶

Di Indonesia, praktek *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini telah dimulai pada awal tahun 1990-an melalui program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) namun pemahaman dan praktek CSR masih belum sinkron. Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR hanya untuk mengejar reputasi dan hanya karena terkait dengan aturan pemerintah yang memberikan kewajiban kepada perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha mengajak perusahaan untuk ikut memperhatikan dunia sekitarnya baik itu sosial maupun lingkungan. Seperti yang tertulis pada pasal 74 UUPT, CSR sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, karena hal itu juga akan berdampak baik bagi perseroan sendiri. Pasal-pasal lain yang menjadi landasan CSR adalah pasal 74 ayat (1). UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007. Dari sini Kesadaran akan pentingnya CSR terus berkembang sejak Indonesia meratifikasi ISO 26000

⁶ Sri Rokhlinasari, *Teori-Teori dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan*, Jurnal kajian ekonomi dan perbankan syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.7,No. 1, 2015, Hal.8.

tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance of Social Responsibility*) yang dirilis pada tanggal 1 November 2010.

Seiring berkembangnya pengungkapan CSR di Indonesia, pengungkapan CSR di Indonesia kini berpedoman pada standart *Global Reporting Iniatif* (GRI G4). *Global Reporting Iniatif* adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan konsep kerja untuk pelaporan berkelanjutan, dan dapat dijadikan referensi oleh seluruh organisasi diberbagai negara. GRI G4 merupakan pembaharuan yang ke empat dari *Global Reporting Iniatif* yang bertujuan untuk membantu pelapor menyusun laporan berkelanjutan atas hal-hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang paling kritikal terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan berkelanjutan yang seperti demikian menjadi standar.

Global Reporting Iniatif pertama kali dibentuk tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. Pada tahun 2000 GRI melahirkan pandan laporan berkelanjutan untuk pertamakalinya, kemudian GRI melakukan revisi terhadap panduan laporan berkelanjutan dalam kurunwaktu tertentu, hasil dari revisi ke empat ini muncullah GRI G4 yang mulai diterapkan sejak bulan Mei 2013. Pada GRI G4 diberikan penekanan lebih besar atas kebutuhan organisasi tentang fokus dalam proses pelaporan dan laporan final, yang berisi topik-topik yang bersifat material bagi bisnis dan pemangku kepentingan utama mereka. Fokus terhadap ‘materialitas’ ini akan menjadikan laporan tersebut lebih relevan, lebih kredibel, dan lebih ramah pengguna. Hal ini akan memungkinkan organisasi memberikan informasi yang lebih baik kepada pasar dan masyarakat mengenai masalah-masalah berkelanjutannya.

Dalam GRI G4 terdapat dua jenis pedoman pengungkapan standar yaitu standar umum dan standar khusus. Pengungkapan strandar umum dibagi dalam tujuh aspek, yaitu strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan *Boundary* teridentifikasi, hubungan

dengan stakeholder, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Sedangkan dalam standar khusus dibagi kedalam tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial (GRI G4, 2013). Terdapat 150 indikator dalam GRI G4 yang terbagi atas 11 bidang yang berbeda. GRI G4 memberikan keleluasaan perusahaan dalam pengungkapan aktivitas sosialnya dengan mempertimbangkan materialitas masalah yang dihadapi perusahaan. Namun tetap ada standard implementasi inti (*Core*) yang harus diungkapkan oleh perusahaan, yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan minimal satu poin dalam kategori ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Laporan berkelanjutan merupakan laporan yang disusun setiap tahun mengenai baik buruknya dampak organisasi terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi, yang kemudian menjadi tolak ukur dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Laporan berkelanjutan idealnya berfokus pada isu-isu yang relevan dan material terhadap konteks keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan, dan para pemangku kepentingan sekitarnya. Studi empiris dan teoritikal sebelumnya menunjukkan bahwa informasi berkelanjutan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan (Atan *et al.* 2018; Buallay, 2019; Caesaria dan Basuki, 2017; Sila dan Cek, 2017; Velte, 2017). Informasi berkelanjutan hadir sebagai kebutuhan baru bagi investor dalam pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi. Elemen berkelanjutan menjadi faktor penting dibandingkan dengan kinerja ekonomik pada masa kini (Caesaria dan Basuki, 2017; Cantele *et al.*, 2018). Para pemimpin perusahaan menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan (Dilling, 2009 dalam Nazir, 2014).

Penggunaan pedoman GRI yang universal mampu membuat laporan berkelanjutan memiliki komparabilitas yang lebih tinggi meskipun digunakan oleh banyak negara di dunia. Namun di Indonesia sendiri belum banyak perusahaan perbankan yang berpedoman pada

GRI G4 dalam menyajikan laporan berkelanjutannya. Beberapa perusahaan perbankan di Indonesia yang menyajikan laporan berkelanjutannya dengan menggunakan pedoman GRI G4 diantaranya ialah Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang juga akan menjadi sample dalam penelitian ini.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR dalam industri perbankan berdasarkan pedoman GRI sebelumnya sudah banyak dilakukan. Vena Agustin (2015), melakukan penelitian terhadap 32 perbankan konvensional dan 11 perbankan syariah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perbankan konvensional mengalami fluktuasi dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya, sedangkan perbankan syariah selalu meningkat. Widya Ais Shala dan Siti Sophiah Rothbatul Aliyah (2016), melakukan analisis pengungkapan CSR pada 4 bank konvensional. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan dalam kategori ekonomi lebih banyak, pelatihan dan pendidikan juga menjadi perhatian besar, sedangkan untuk kategori lingkungan pengungkapannya sangat jauh dari cukup. Leander Resadhatu Rusdiono (2017), penelitian ini melakukan analisis pengungkapan CSR pada 8 bank konvensional. Hasil dari penelitiannya menunjukkan masih banyak pelaporan berkelanjutan yang disusun tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman GRI G4.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan perbankan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan jenis Bank Konvensional
3. Penelitian ini menggunakan Standar Pelaporan Global Reporting Initiative (GRI) versi G4 dan menggunakan 3 kategori sesuai standar GRI G4, yaitu : Kategori ekonomi, Kategori lingkungan, dan Kategori sosial, yang baru.

4. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2019 dari perusahaan perbankan yang mengungkapkan pelaporan keberlanjutannya sesuai pedoman GRI G4 yaitu : Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, demikianlah pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan menggunakan pedoman GRI G4, yang pada khusus ini dilihat dari sisi perusahaan perbankan dimana sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk pertumbuhan ekonomi dengan menghimpun dana dari nasabahnya yang tidak lain adalah masyarakat sendiri, diwajibkan untuk memberikan informasi yang relevan dengan pengungkapan CSR yang benar sesuai dengan standart pedoman GRI G4.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Pengungkapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI G4) Pada Perbankan Indonesia** “ yang diwakili oleh Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), suatu perusahaan harus dapat memahami dan mengimplementasikan dengan benar apa yang menjadi standar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut. Di Indonesia sendiri beberapa perusahaan telah membuat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan keberlanjutan yang sesuai dengan pedoman GRI G4, namun masih ada perusahaan yang tidak sesuai pengimplementasiannya dengan standar GRI G4. Untuk itu penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengungkapan laporan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) dengan pedoman GRI G4?
2. Bagaimana hasil penilaian kesesuaian laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) pada Bank Mandiri, Bank Danamon, BNI, BTN dan BRI dengan kategori pada pedoman GRI G4?
3. Bagaimana perbandingan hasil perhitungan persentase pengungkapan laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) pada Bank Mandiri, Bank Danamon, BNI, BTN dan BRI?
4. Bagaimana pengungkapan laporan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) pada sektor perbankan untuk kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirancangan tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui pengungkapan laporan berkelanjutan dengan pedoman GRI G4.
2. Mengetahui hasil penilaian kesesuaian laporan keberlanjutan pada Bank Mandiri, Bank Danamon, BNI, BTN dan BRI dengan kategori pada pedoman GRI G4.
3. Mengetahui perbandingan hasil perhitungan persentase pengungkapan laporan keberlanjutan pada Bank Mandiri, Bank Danamon, BNI, BTN dan BRI.
4. Mengetahui pengungkapan laporan berkelanjutan pada sektor perbankan untuk kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 pada Perbankan Indonesia ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan penerapan ilmu yang sudah dipelajari dalam ekonomi akuntansi khususnya mengenai pengungkapan laporan berkelanjutan yang berpedoman pada GRI G4.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk mengevaluasi pelaporan indikator dalam tanggung jawab sosial serta pelaporannya khususnya bagi perusahaan yang bergerak disektor perbankan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dari berbagai literatur ekonomi mengenai indikator-indikator yang dibahas dalam laporan berkelanjutan khususnya pada perusahaan perbankan.

4. Bagi Pihak Lain yang Berkepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi yang membutuhkan serta menjadi landasan untuk penelitian dibidang laporan berkelanjutan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

Kata 'Bank' berasal dari bahasa Italia yaitu Banco yang berarti kepingan papan yang digunakan sebagai tempat meletakkan buku yaitu sejenis meja (Mohammad Muslehuddin, 1998). Fungsi ini kemudian berubah semakin luas yaitu sebagai meja tempat menukar uang. Aktivitas ini dilakukan oleh para pemberi pinjaman (kreditor) dan para penukar uang di Eropa untuk menunjukkan/mempamerkan uang mereka kepada para pedagang dan orang-orang yang berlayar. Aktivitas seperti ini telah mulai dilakukan pada abad pertengahan dan dari sinilah timbul istilah 'Bank'.⁷

A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, "bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain". Definisi bank menurut UU No. 14/1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah, "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang kegiatan utamanya ialah melaksanakan

⁷ Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Press, 2010.

⁸ Dr. Thomas Suyatno, M.M (dkk), *Kelembagaan Perbankan*, edisi tiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

berbagai macam jasa keuangan seperti menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat, yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, jasa lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam era masyarakat ekonomi modern sekarang, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak lepas kaitannya dengan uang, sehingga eksistensi dunia perbankan dalam menawarkan jasa keuangannya semakin diperlukan, hal ini menyebabkan peranan perbankan semakin penting dan luas karena turut menentukan kelancaran aktivitas perekonomian suatu negara. Fungsi dan peranan bank dalam aktivitas perekonomian yang semakin luas ini memang tidak bisa dihindari dan menyebabkan sebagian besar masyarakat harus ikut ambil andil menjadi bagian dari sistem yang ada. Dapat dilihat bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu terdapat tiga fungsi pokok pada bank, yaitu: (1) menghimpun dana dari masyarakat, (2) menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, dan (3) memberikan jasa layanan lalu-lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya.⁹ Dalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi , diantaranya:

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengannya.

2. Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan.

⁹ Permedi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9), yaitu sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill.

3. *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan di Indonesia kini sedang gencar memasang strategi guna mengantongi kepercayaan masyarakat, terutama kepada *stakeholder* yang

berhubungan secara langsung dengan perusahaan. Pada perusahaan perbankan sendiri, memelihara kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan mewujudkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam dunia perbankan memang tidak bisa dipisahkan dari strategi kesinambungan yang menjamin bahwa perbankan menanggapi dengan baik resiko dan peluang yang ada di lingkungan perusahaan perbankan beroperasi. Selain itu, keterlibatan *stakeholder* ini juga dapat membantu perusahaan perbankan untuk menjelaskan prioritas dan mengembangkan kebijakan perusahaan, serta dapat membantu perusahaan perbankan dalam memperoleh wawasan mengenai cara pemangku kepentingan eksternal memandang kinerja perusahaan dan isu-isu kesinambungan.

2.2 Corporate Social Responsibility

Berperilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga eksistensinya agar dapat diterima dengan baik dalam rantai bisnisnya. Semakin lama semakin besar ekspektasi bagi perusahaan untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan sosial, membuat pengungkapan CSR bukan lagi dianggap sebagai beban untuk perusahaan, namun dianggap sebagai bentuk etika perusahaan dalam bentuk kegiatan sosial. Perusahaan juga semakin menyadari bahwa CSR juga diperlukan untuk kepedulian terhadap kepentingan *stakeholder*. Dengan melaksanakan kegiatan CSR juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan, keselarasan hubungan masyarakat dan perusahaan ini akan membantu mengurangi angka kemiskinan negara dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dari perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah pandangan yang muncul sebagai pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan atau organisasi (Jedrzej

George Frynas, 2009:1). Menurut Chandler dan Wether Jr (2014:6) CSR merupakan sebuah pandangan perusahaan dan peran dalam masyarakat yang dianggap sebagai tujuan perusahaan selain mengejar tujuan dalam memaksimalkan keuntungan dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. CSR meliputi hubungan antara perusahaan atau organisasi dan masyarakat disekitar perusahaan atau organisasi tersebut.

CSR mendefinisikan masyarakat secara luas, pada berbagai tingkatan, untuk mencakup seluruh pemangku kepentingan dan unsur kelompok untuk menjaga minat terhadap operasi perusahaan. Beberapa definisi CSR dari berbagai negara (Chandler dan Wether, Jr., 2014:9):

1. United Kingdom : CSR adalah hal mengenai bisnis dan organisasi lain untuk mengelola dampak aktivitasnya kepada lingkungan dan masyarakat melebihi hukum. Secara khususnya, hal ini meliputi bagaimana organisasi berinteraksi dengan karyawan, pemasok, konsumen, dan komunitas disekitar tempat beroperasi, dan segala hal yang berkaitan dengan menjagalingkungan.
2. United States : CSR adalah berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan hal yang berdampak positif bagimasyarakat.
3. European Union : CSR adalah proses untuk mengintegrasikan sosial, lingkungan, dan perhatian terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan operasi bisnis dan menjadi komponen utama dalam berhubungan dengan pemangkukepentingannya.
4. United Nations : CSR dapat dipahami sebagai konsep manajemen dan proses yang berintegrasi antara keprihatinan sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi perusahaan dengan pemangkukepentingan.¹⁰

Dari berbagai defenisis CSR diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi terhadap sosial dan lingkungan

¹⁰ Leander Resadhato Rusdiono, *Analisa Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Rangka Menilai Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan Panduan GRI G4 Umum dan GRI Panduan Khusus Layanan Keuangan*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017, Hal 7.

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya.

Diskusi tentang pentingnya sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Saat itulah istilah tanggung jawab sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* lahir. Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya Jhon Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR kedalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet dan people. ¹¹*Triple Bottom Line* (TBL) merupakan kerangka akuntansi yang menggabungkan 3 dimensi yaitu sosial, lingkungan, dan finansial. Hal yang membedakan dari kerangka pelaporan tradisional adalah kerangka ini menyertakan lingkungan dan sosial sebagai pengukuran kinerja perusahaan atau organisasi. Tiga dimensi yang dalam TBL biasa disebut *people*, *planet*, dan *profits* (Slaper dan Hall, 2011). Kerangka *Triple Bottom Line* ini bukan hanya meliputi perhitungan profit, *return on investment* (ROI), tetapi juga mencakup perhiungan dari segi lingkungan dan sosial. TBL menjadi alat yang paling penting digunakan dalam mendukung tujuan keberlanjutan tersebut. TBL semakin lama semakin banyak yang diminati untuk perusahaan atau organisasi profit, non-profit, dan pemerintahan. Perusahaan atau organisasi mulai mengadopsi TBL dalam laporan keberlanjutan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan pendekatan kepada instansi pemerintah. Dari pemahaman *Triple Bottom Line* ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama suatu perusahaan tidak lagi untuk mencari keuntungan (*profit*), namun juga harus dapat menjaga

¹¹ T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol 2, No.2, 2012, hal. 50.

kesejahteraan masyarakat banyak termasuk juga untuk menjaga kepentingan ketenagakerjaan (*people*) dan menjamin kelestarian lingkungan hidup (*planet*) karena sering kali kerusakan alam yang terjadi adalah akibat dari ketidak pekaan perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam sebagai salah satu sumber dayanya, dan yang terakhir perusahaan juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dalam hal ini termasuk juga untuk menjaga kepentingan ketenagakerjaan (*people*), terlebih untuk perusahaan perbankan, kesejahteraan masyarakat ini sangat perpenaruh pada keberlangsungan hidup perusahaan melihat kegiatan oprasional perusahaan perbankan yang tidak lepas dari dukungan masyarakat (*people*), maka dari itu dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan.

Di Indonesia sendiri praktek *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini telah dimulai pada awal tahun 1990-an melalui program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) namun pemahaman dan praktek CSR masih belum sinkron. Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR hanya untuk mengejar reputasi dan hanya karena terkait dengan aturan pemerintah yang memberikan kewajiban kepada perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha mengajak perusahaan untuk ikut memperhatikan dunia sekitarnya baik itu sosial maupun lingkungan. Seperti yang tertulis pada pasal 74 UUPT, CSR sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, karena hal itu juga akan berdampak baik bagi perseroan sendiri. Pasal-pasal lain yang menjadi landasan CSR adalah pasal 74 ayat (1). UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan

Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007. Dari sini Kesadaran akan pentingnya CSR terus berkembang sejak Indonesia meratifikasi ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance of Social Responsibility*) yang dirilis pada tanggal 1 November 2010.

Seiring berkembangnya pengungkapan CSR di Indonesia, pengungkapan CSR di Indonesia kini berpedoman pada standart *Global Reporting Iniatif* (GRI G4). *Global Reporting Iniatif* adalah sebuah organisasi internasional yang menyediakan konsep kerja untuk pelaporan berkelanjutan, dan dapat dijadikan referensi oleh seluruh organisasi diberbagai negara. GRI G4 merupakan pembaharuan yang ke empat dari *Global Reporting Iniatif* yang bertujuan untuk membantu pelapor menyusun laporan berkelanjutan atas hal-hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang paling kritikal terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan berkelanjutan yang seperti demikian menjadi standar.

Pelaksanaan CSR di ndonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab *felt needs* (keinginan) daripada *real needs* (kebutuhan nyata) masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan CSR yang tepat. Berikut adalah beberapa motivasi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yang terdapat dalam tiga tahap, yaitu :

1. *Corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. *Corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. *Corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial (Saidi, 2004: 69)

Pada akhirnya aktivitas CSR dilakukan untuk menciptakan citra positif dimata para *stakeholder*.

Selain sebagai bentuk penvitraan positif, CSR juga merupakan bentuk pertanggung

jawaban perusahaan kepada para *stakeholder* sebagai bagian dari lingkungannya melalui pengungkapan informasi non-keuangan. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu: 1) Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 2) Dalam era globalisasi yang telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. 4) LSM dan pecinta lingkungan makin vocal dalam mengkritik perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.¹²

2.3 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, yang tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.¹³ Pada teori *stakeholder* dijelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan manfaat yang ditimbulkan bagi para *stakeholder*-nya karena keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh peranan dari para *stakeholder*, dari sisi terlihat bahwa semakin kuat hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* maka akan semakin baik suatu perusahaan/ bisnis yang akan berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan dimasa depan.

Freeman (1983) menjelaskan pengertian *stakeholder* dalam arti luas dan arti sempit, berikut penjelasannya :

- Dalam arti luas, *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi

¹² Sri Rokhlinasari, *Teori-Teori dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan*, Jurnal kajian ekonomi dan perbankan syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.7, No. 1, 2015, Hal.6.

¹³ Totok mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 68.

pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Contohnya kelompok protes, instansi pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat, karyawan, segmen pelanggan, dan pemilik saham.

- Dalam arti sempit *stakeholder* merupakan kelompok atau individu di mana perusahaan atau organisasi bergantung untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya karyawan, pelanggan, pemasok tertentu, pemerintah pusat, lembaga, pemilik saham, dan lembaga keuangan tertentu.

Yang dimaksud dengan *Stakeholder* adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Nor Hadi, 2011:93). Menurut Kasali (2015) mengklasifikasikan stakeholder kedalam beberapa jenis yaitu : *stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham, *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berasal luar organisasi seperti pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat dan pemerintah, *stakeholders* premier adalah *stakeholders* yang harus diperhatikan oleh perusahaan, *stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang kurang penting, sedangkan *stakeholders* marjinal merupakan *stakeholders* yang sering diabaikan oleh perusahaan (Hadi 2011:110).¹⁴ CSR merupakan fenomena terkait dengan strategi perusahaan yang mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu CSR dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang sebagai sumber informasi penting mengenai keberadaan sumberdaya ekonomi perusahaan guna untuk pengambilan keputusan.

¹⁴ Lindawati dan Marsella Puspita, *Corporate Social Responsibility (CSR): Implikasi Stakeholder dan Legitimacy GAP Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Universitas Macung Malang, Vol.6, No.1, 2015, hal 161.

2.4 Teori Legitimasi

Teori lain yang melandasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah teori legitimasi. Teori legitimasi ini erat hubungannya dengan teori *stakeholder*. Menurut Hadi (2011) legitimasi dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem pengelolaan perusahaan dengan orientasi keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat.

Menurut Dowling dan Pletter, perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari seluruh *stakeholder* dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Maka perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dari tempat perusahaan berada (Deegan, 2004). Deegan juga menjelaskan bahwa terdapat dua hal dalam teori legitimasi di negara berkembang, yaitu: *Pertama*, kapabilitas dalam menempatkan morif maksimalisasi keuntungan membuat gambar lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggungjawab sosialnya. *Kedua*, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan intuisi yang berbeda dalam konteks yang berbeda.¹⁵ Gray *et.al* (1996) dalam Nor (2011:88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Berdasarkan defenisi-defenisi legitimasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan dalam upaya memastikan kesesuaian kegiatan operasi perusahaan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat tempat perusahaan tersebut berdiri.

¹⁵ Edoardus Satya Adhiwardana dan Daljono, *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan*. Dipenogoro Journal of Accounting. Vol.2, No.2, 2013, Hal.2.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Imam dan Anis (2014:442) juga memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Maka Deegan, *et.al* (2002: 319-320) menyatakan, dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika pihak manajemen menganggap bahwa hal tersebut adalah yang diharapkan oleh komunitas. Dengan begitu sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan masyarakat pengungkapan CSR dalam perusahaan sangat penting untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan legitimasi perusahaan tersebut yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang dan memastikan *going concern* perusahaan.

2.5 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

CSR sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kata ‘pembangunan berkelanjutan’ merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *sustainable development*, yang diartikan sebagai proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan ini telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan yaitu pemahaman *triple bottom line* oleh John Elkington. Maka dari itu isu terkait

CSR harus dikaji dari perspektif *people*, *planet*, dan *profit* dalam satu kesatuan.¹⁶

Laporan keberlanjutan adalah laporan eksternal yang diterbitkan oleh perusahaan, dalam bentuk brosur yang dicetak atau elektronik di internet, yang melibatkan manajemen dan karyawan dalam menetapkan tujuan keberlanjutan perusahaan, pengumpulan data, dan menciptakan dan komunikasi informasi keberlanjutan (Schaltegger, Bennet dan Burritt, 2006). Menurut Gray dan Bebbington (2001) laporan keberlanjutan adalah laporan non keuangan, yang terpisah dari laporan keuangan, atau dengan kata lain laporan yang berfokus pada lingkungan yang didalamnya terdapat pernyataan; definisi; misi; pernyataan mengenai kebijakan atau tujuan; dan perkembangan pencapaian terkait lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut Elvira Luthan (2010) Laporan keberlanjutan adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan yang didalamnya melaporkan aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan terjadi di perusahaan yang memengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat.

Pelaporan keberlanjutan dikeluarkan pada akhir 1980an hingga awal 1990-an, hal ini merupakan reaksi dari kecelakaan dan bencana yang berhubungan dengan Bhopal, Scheweirhalle, Chernobyl, dan Hoechst AG. Konsekuensinya, perusahaan banyak dianggap sebagai penyebab utama dalam perusakan lingkungan. Untuk menghindari hilangnya legitimasi sosial bagi perusahaan, perusahaan mulai secara sukarela untuk mengungkapkan informasi mengenai kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan kepada pemangku kepentingan. Mulai sejak itu, semakin banyak perusahaan yang memberikan informasi finansial, sosial, dan lingkungan dalam bentuk laporan keberlanjutan.¹⁷ Pedoman laporan keberlanjutan semakin berkembang pesat seiring dengan semakin maraknya perusahaan atau organisasi memiliki kesadaran terhadap pengungkapan aktivitas perusahaan yang berkaitan

¹⁶ Nurdial M. Rachman (dkk), *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.

¹⁷ Leander Resadhatu Rusdiono, *OP. Cit.*, Hal. 12.

dengan keberlanjutan.

Pada laporan keberlanjutan, terdapat prinsip-prinsip pelaporan yang terbagi menjadi 2 kelompok. Prinsip-prinsip yang pertama dirancang untuk menentukan konten suatu laporan (GRI G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, 2013):

1. Pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholderinclusiveness*)

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepetingannya, serta menjelaskan bagaimana cara perusahaan merespon kepentingan dan harapan pemangku kepentingan.

2. Konteks keberlanjutan (*sustainabilitycontext*)

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi/perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang luas.

3. Materialitas(*materiality*)

Laporan harus memuat aspek-aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan dari perusahaan; serta berpengaruh terhadap penilaian dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

4. Kelengkapan(*completeness*)

Laporan harus mencakup informasi mengenai aspek material serta batasannya (*boundaries*) yang cukup untuk memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi/perusahaan pada periode tertentu.

Pada prinsip kedua ini membahas mengenai pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Kualitas informasi penting untuk para pemangku kepentingan dapat membuat asesmen kinerja yang logis, masuk akal, dan mengambil keputusan yang tepat. Prinsip-prinsip tersebut yaitu (GRI G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, 2013) :

1. Keseimbangan(*balance*)

Laporan harus memuat aspek positif dan negatif perusahaan untuk memungkinkan penilaian kinerja keseluruhan yang wajar.

2. Komparabilitas(*comparability*)

Organisasi/perusahaan harus memilah, memilih, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan sedemikian rupa agar pemangku kepentingan dapat menganalisa kinerja organisasi/perusahaan dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan untuk mendukung analisis yang berhubungan dengan organisasi lain.

3. Ketepatan (*accuracy*)

Informasi yang disajikan harus akurat dan detail secara wajar bagi penilaian kinerja organisasi oleh pemangku kepentingan.

4. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Organisasi/perusahaan harus melaporkan secara rutin agar informasi bagi pemangku kepentingan sebagai dasar membuat keputusan selalu tersedia.

5. Kejelasan(*clarity*)

Organisasi/perusahaan harus menyajikan laporan yang mudah dipahami dan diakses bagi pemangku kepentingan.

6. Keandalan(*reliability*)

Organisasi/perusahaan harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisa dan menyajikan informasi yang proses yang digunakan dalam mempersiapkan laporan sedemikian rupa sehingga dapat diuji kualitas dan materialitas informasinya.

2.6 Global Reporting Initiatives(GRI G4)

Seiring berkembangnya pengungkapan CSR di Indonesia, pengungkapan CSR di Indonesia kini berpedoman pada standart *Global Reporting Iniatif* (GRI G4). GRI merupakan pedoman yang paling banyak dipakai oleh perusahaan dan organisasi, dari berbagai jenis, ukuran, dan sektor ,untuk mengungkapkan pelaporan keberlanjutan karena indikator kinerjanya yang dapat diaplikasikan dalam berbagai organisasi dalam berbagai industri. Penyempurnaan kualitas data dan kualitas prosedur pengumpulan data untuk mendapatkan informasi keberlanjutan yang berkualitas dan komparabilitas (Schaltegger1997)

Global Reporting Iniatif ini merupakan sebuah organisasi internasional yang menyediakan konsep kerja untuk pelaporan berkelanjutan, dan dapat dijadikan referensi oleh seluruh organisasi diberbagai negara. GRI G4 merupakan pembaharuan yang ke empat dari *Global Reporting Iniatif* yang bertujuan untuk membantu pelapor menyusun laporan berkelanjutan atas hal-hal yang penting, berisikan informasi berharga tentang isu-isu organisasi yang paling kritikal terkait keberlanjutan, dan menjadikan pelaporan berkelanjutan yang seperti demikian menjadi standar.GRI adalah sebuah organisasi internasional independen yang membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk memahami dan mengkomunikasikan isu- isu bisnis mengenai dampak binis seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan lain-lain. GRI adalah suatu upaya internasional yang bersifat multistakeholder untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang sama untuk pelaporan kinerja perusahaan secara *financial, social, dan environmental*. GRI menyertakan partisipasi aktif ratusan kelompok *stakeholder* yang berbeda, termasuk organisasi bisnisa, akuntan, organisasi pembela hak asasi manusia, organisasi lingkungan, organisasi buruhdan organisas pemerintah dari berbagai belahan dunia, dalam merancang kerangka kerja yang sama untuk *sustainability reporting* (Elvira Luthan, 2010:48).

Global Reporting Iniatif pertama kali dibentuk tahun 1997 di Boston, Amerika Serikat. GRI ini merupakan organisasi non-profit yang dibentuk oleh Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), Telleus Institute, United Nations Environment Programme (UNEP). Tujuan dibentuknya GRI ini adalah membentuk mekanisme yang akuntabilitas untuk memastikan setiap perusahaan mengikuti prinsip CERES yaitu menciptakan lingkungan yang bertanggungjawab. Kemudian pada tahun 2000 GRI melahirkan panduan laporan berkelanjutan untuk pertamakalinya, kemudian GRI melakukan revisi terhadap panduan laporan berkelanjutan dalam kurunwaktu tertentu, penyempurnaan standar dari laporan keberlanjutan ini memang harus dilakukan secara terus menerus dan hasil dari revisi ke empat ini muncullah GRI G4 yang mulai diterapkan sejak bulan Mei 2013. Pada GRI G4 diberikan penekanan lebih besar atas kebutuhan organisasi tentang fokus dalam proses pelaporan dan laporan final, yang berisi topik-topik yang bersifat material bagi bisnis dan pemangku kepentingan utama mereka. Fokus terhadap ‘materialitas’ ini akan menjadikan laporan tersebut lebih relevan, lebih kredibel, dan lebih ramah pengguna. Hal ini akan memungkinkan organisasi memberikan informasi yang lebih baik kepada pasar dan masyarakat mengenai masalah-masalah keberlanjutannya. Tujuan dari G4 adalah untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktik standar. Dengan menggunakan pedoman ini organisasi yang melaporkan dapat menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan terstandardisasi yang dapat digunakan untuk menilai peluang dan resiko, serta pengambilan keputusan yang lebih matang baik di dalam perusahaan maupun di antara para pemangkukepentingannya.

Visi dari GRI adalah *“to create a future where sustainability is integral to every organization's decision-making process”*, sedangkan misi dari GRI adalah *“to empower decision makers everywhere, through our sustainability standards and multi-stakeholder network, to*

take action towards a more sustainable economy and world". Kepercayaan yang dipegang oleh GRI adalah

1. *In the power of a multi-stakeholder process and inclusivenetwork*
2. *Transparency is a catalyst forchange*
3. *Our standards empower informed decisionmaking*
4. *A global perspective is needed to change theworld*
5. *Public interest should drive every decision an organizationmake*

2.7 PengungkapanStandar GRI G4

Dalam GRI G4 terdapat dua jenis pedoman pengungkapan standar yaitu standar umum dan standar khusus. Pengungkapan strandar umum dibagi dalam tujuh aspek, yaitu strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan *Boundary* teridentifikasi, hubungan dengan stakeholder, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Sedangkan dalam standar khusus dibagi kedalam tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial (GRI G4, 2013). Terdapat 150 indikator dalam GRI G4 yang terbagi atas 11 bidang yang berbeda. GRI G4 memberikan keleluasaan perusahaan dalam pengungkapan aktivitas sosialnya dengan mempertimbangkan materialitas masalah yang dihadapi perusahaan. Namun tetap ada standard implementasi inti yang harus diungkapkan oleh perusahaan, yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan minimal satu poin dalam kategori ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berikut adalah 2 jenis pengungkapan standar dalam GRI G4 yaitu Pengungkapan Standar Umum dan Pengungkapan Standar Khusus (GRI G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, 2013).

2.7.1 Pengungkapan Standar Umum

Pengungkapan standar umum berlaku untuk seluruh organisasi yang menyediakan laporan keberlanjutan. Di dalam pengungkapan standar umum dibagi menjadi enam bagian:

1. Profil Organisasi

Pengungkapan standar ini mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada didalam pedoman. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah GRI 102-1 sampai dengan GRI 102-13.

2. Strategi

Pengungkapan standar ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalamnya. Strategi dan analisi dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan, namun sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang topik strategis bukan sekadar ringkasan konten laporan.

Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah GRI 102-14 dan GRI 102-15 .

3. Etika dan Integritas

Pengungkapan Standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang:

- Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku diorganisasi
- Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum
- Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas

Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah GRI 102-16 dan GRI 102-17.

4. Tata Kelola

Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang :

a. Struktur tata kelola dan komposisinya

Transparansi pada struktur dan komposisi tata kelola organisasi penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga dan individu yang terkait. Pengungkapan Standar ini menggambarkan bagaimana badan tata kelola tertinggi ditetapkan dan dibentuk dalam mendukung tujuan organisasi, dan bagaimana tujuan tersebut dikaitkan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

b. Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi
Badan tata kelola tertinggi menetapkan budaya organisasi, dan memiliki peran yang besar dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strateginya.

c. Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi

Pengungkapan Standar ini menjelaskan kesediaan dan kemampuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk memahami, membahas, dan menanggapi secara efektif dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial; serta menunjukkan apakah sebuah proses diterapkan, dilaksanakan secara internal atau eksternal, guna memastikan keefektifan berkelanjutan dari badan tata kelola tertinggi.

d. Peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko

Pengungkapan Standar ini menjelaskan apakah badan tata kelola tertinggi bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko dan keefektifannya secara keseluruhan. Pertimbangan-pertimbangan dari badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior terkait dengan elemen-elemen risiko untuk jangka yang lebih panjang dan cakupan yang lebih luas, serta pengintegrasian ke dalam perencanaan strategi, merupakan pengungkapan penting dalam tata kelola.

e. Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan

Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana keterlibatan badan tata kelola tertinggi dalam menyusun dan menyetujui pengungkapan keberlanjutan organisasi, dan pada

tingkatan mana hal ini dapat diselaraskan dengan proses pelaporan finansial.

f. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, sosial

Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana badan tata kelola tertinggi terlibat dalam memantau dan bereaksi terhadap kinerja organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mengakibatkan risiko dan peluang besar di mana badan tata kelola tertinggi harus memastikan pemantauan dan, bila sesuai, penanganannya. Pengungkapan Standar ini juga membahas proses organisasi untuk menyampaikan permasalahan penting pada badan tata kelola tertinggi.

g. Remunerasi dan intensif

Pengungkapan Standar ini berfokus pada kebijakan remunerasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pengaturan remunerasi dapat mendukung tujuan strategis organisasi, selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, dan memungkinkan untuk dapat merekrut, memotivasi, serta mempertahankan anggota badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan karyawan.

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah GRI 102-40 sampai dengan GRI 102-44.

6. Praktik Pelaporan

Pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh *assurance* eksternal. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah GRI 102-45 sampai dengan GRI 102-56.

2.7.2 Pengungkapan Standar Khusus

Pedoman ini mengatur Pengungkapan Standar Khusus ke dalam tiga Kategori Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Kategori Sosial lebih lanjut dibagi ke dalam empat sub-Kategori, yaitu Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab atas Produk. Dapat dilihat pada Lampiran 2.

1. Kategori Ekonomi

Dimensi keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi tingkat lokal, nasional, dan global.

Kategori ekonomi memberikan gambaran mengenai arus modal diantara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat.

Aspek Kinerja Ekonomi : GRI 201-1 sampai dengan GRI 201-4.

Aspek Keberadaan di Pasar : GRI 202-1 dan GRI 202-2

Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung : GRI 203-1 dan GRI 203-2

Aspek Praktik Pengadaan : GRI 204-1

Aspek Anti Korupsi : GRI 205-1 sampai dengan GRI 205-3

Aspek Perilaku Anti-Persaingan : GRI 206-1

Aspek Pajak : GRI 207-1 sampai dengan GRI 207-4

2. Kategori Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (energi dan air) dan output (emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

Aspek Material : GRI 301-1 sampai dengan GRI 301-3

Aspek Energi : GRI 302-1 sampai dengan GRI 302-5

Aspek Air dan Efluen : GRI 303-1 sampai dengan GRI 303-5

Aspek Keanekaragaman Hayati : GRI 304-1 sampai dengan GRI 304-4

Aspek Emisi : GRI 305-1 sampai dengan GRI 305-7

Aspek Limbah : GRI 306-1 sampai dengan GRI 306-5

Aspek Kepatuhan Lingkungan : GRI 307-1

Aspek Penilaian Lingkungan Pemasok : GRI 308-1 dan GRI 308-2

3. Kategori Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi.

Kategori Sosial berisi sub-kategori :

a. Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

Aspek Kepegawaian : GRI 401-1 sampai dengan GRI 401-3

Aspek Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen : GRI 402-1

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja : GRI 403-1 sampai dengan GRI 403-10

Aspek Pelatihan dan Pendidikan : GRI 404-1 sampai dengan GRI 404-3

Aspek Keanekaragaman dan Kesempatan Setara : GRI 405-1 dan GRI 405-2

Aspek Non-Diskriminasi : GRI 406-1

Aspek Kebebasan Berserikat dan Perundingan kolektif : GRI 407-1

Aspek Pekerja Anak : GRI 408-1

Aspek Kerja Paksa atau Wajib Kerja : GRI 409-1

Aspek Praktik Keamanan : GRI 410-1

Aspek Hak-Hak Masyarakat Adat : GRI 411-1

Aspek Penilaian Hak Asasi Manusia : GRI 412-1 sampai dengan 412-3

Aspek Masyarakat Lokal : GRI 413-1 dan GRI 413-2

Aspek Penilaian Sosial Pemasok : GRI 414-1 dan GRI 414-2

Aspek Kebijakan Publik : GRI 415-1

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan : GRI 416-1 dan GRI 416-2

Aspek Pemasaran dan Pelabelan : GRI 417-1 sampai dengan GRI 417-3

Aspek Privasi Pelanggan : GRI 418-1

Aspek Kepatuhan Sosial Ekonomi : GRI 419-1

2.8 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Banyak peneliti terdahulu yang menggunakan pengungkapan CSR dalam penelitiannya baik itu dengan standar pedoman GRI-G4 sebagai bahan perbandingannya maupun pedoman yang lain. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan daftar peneliti-peneliti terdahulu beserta hasil penelitiannya.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wiya Ais Sahla & Siti Sophiah Aliyah (2016)	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI-G4) Pada Perbankan Indonesia	Bank BRI mengungkapkan CSR paling baik. Pada keempat sampel, kategori ekonomi lebih banyak diungkapkan, pelatihan, dan pendidikan juga menjadi perhatian besar, sedangkan kategori lingkungan pengungkapannya jauh dari cukup.

2.	Leander Resadhato Rusdiono (2017)	Analisa Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Rangka Menilai Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan Panduan GRI G4 Umum dan GRI Panduan Khusus Layanan Keuangan	Bank BRI dan Bank BTN mengungkapkan laporan keberlanjutan yang paling baik dan pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan hasil dari kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan.
3.	Bella Lailatus Saadah (2017)	Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Diukur dengan Pedoman GRI G4 (Studi Empiris Sektor Perbankan di BEI Tahun 2013-2015)	Tingkat perkembangan pengungkapan tanggung jawab sosial Bank BNI dan Bank BRI mengalami penurunan, dan Bank Mandiri mengalami kenaikan, sedangkan Bank Danamon dan Bank Maybank Indonesia mengalami penurunan pada Tahun 2014 dan

			Kenaikan pada Tahun 2015.
4.	Hanif Ibrahim (2018)	Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Rangka GRI G4 Umum dan GRI Panduan Khusus Layanan Keuangan	Pengungkapan laporan keberlanjutan yang terbaik ialah BRI dalam kategori ekonomi, Bank Mandiri untuk kategori lingkungan, BCA untuk kategori sosial
5.	Mutmainah Juniawati (2018)	Pengukuran Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank Syariah di Indonesia	Bank Syariah Indonesia sudah mengungkapkan GRI G4 dengan baik. Pengungkapan Standar Umum dilakukan sebesar 85% oleh Bank BNI syariah, Bank BRI syariah dan BSM. Namun untuk Pengungkapan Standar Khusus, Bank BNI syariah

			lebih unggul dari Bank BRI syariah dan BSM
--	--	--	--------------------------------------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan adanya desain penelitian untuk menuntun langkah-langkah peneliti dalam memperoleh data, mengolah data hingga menghasilkan suatu laporan penelitian. Desain penelitian adalah suatu strategi yang mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntut peneliti pada seluruh proses penelitian (Nursalam,2003 : 81). Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian yang baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas (Sarwono, 2006).

Adapun proses desain penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Topik dan Judul Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu mengawalinya dengan Menentukan topik dan judul penelitian. Dengan melakukan penentuan topik dan judul penelitian penulis dapat menentukan objek yang akan diteliti. Penulismenentukan topik penelitian ini ialah pengungkapan CSR berdasarkanpedoman GRI G4 pada perbankan Indonesia.

2. Menentukan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Pada hakikatnya objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan

sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 perusahaan perbankan yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2019 dan sudah mempublikasikan laporan tahunannya (*Annual Report*) pada *Official Website* masing-masing perusahaannya, perusahaan perbankan tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI sebagai objek penelitian.

3. Mengumpulkan Data Penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan sebagai data-data penunjang dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang dibutuhkan terkait dengan penelitian berupa laporan tahunan (*Annual Report*) dari *Official Website* masing-masing sampel penelitian yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI tahun 2019.

4. Mengolah Data Penelitian dan Melakukan Analisa

Dalam mengolah data diperlukan adanya batasan-batasan yang menjadi lingkup penelitian agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah. Dalam penelitian ini sendiri penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian yaitu berupa data-data sekunder hanya pada perusahaan perbankan saja dan peneliti juga hanya melakukan pembahasan yang terkait indikator kategori saja, yang dalam penelitian ini menggunakan GRI G4. Hal ini dilakukan untuk lebih fokusnya penelitian yang dilakukan.

Dari data sekunder yang penulis kumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data dengan cara membandingkan indikator yang terdapat pada setiap laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2019 tersebut. Kemudian peneliti melakukan analisa dengan landasan landasan teori yang ada.

5. Membuat Kesimpulan dan Saran

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah membuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil analisis tersebut.

Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dinamakan penelitian deskriptif karena dilakukan tanpa hipotesis yang dirumuskan secara ketat, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu (Molly, 2002 dalam Sembodo, 2007). Hasil laporan penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan untuk deskripsikan gejala-gejala yang diamati, Jadi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji atau merumuskan hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang apa adanya suatu variable, gejala, atau keadaan, yang dalam hal ini mengenai pengungkapan CSR berdasarkan GRI-G4 pada perbankan Indonesia. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2015).

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini bersifat apa adanya, jenis metode penelitian ini membicarakan tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. metode ini juga menggambarkan proses dalam memperoleh dan mengolah informasi yang kemudian hasilnya menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian dan akhirnya lebih menekankan makna pada hasil laporan penelitiannya. Dengan metode penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sumber data, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) tahun 2019 masing-masing bank yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan konvensional di Indonesia. Alasan peneliti melakukan penelitian pada perusahaan perbankan karena perusahaan perbankan memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara, bank juga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara, disisilain dilihat dari kegiatan masarakat sehari-hari yang tidak terlepas dari jasa yang diberikan oleh perusahaan perbankan membuat perusahaan perbankan ini merupakan salah satu sektor usaha yang paling diharapkan memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang. Maka dari itu perusahaan perbankanpun turut melaporan CSR pada laporan tahunannya melihat perapengguna informasi yang tidak lagi hanya memperhatikan laba yang diperoleh perusahaan tetapi juga melihat informasi yang berkaitan dengan peran perusahaan terhadap tanggungjawab sosialnya.

Periode sample yang akan peneliti gunakan pada pnelitian ini adalah laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2019, pemilihan periode ini digunakan karena tahun 2019 ini merupakan periode data terbaru dan belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Kemudian, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan ialah pengambilan sample. Pada penelitian inimetode pengambilan sample yang digunakan ialah *Porpusive Sampling* yaitu pengambilan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Dalam penelitian ini kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah
2. Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2019
3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan pada *Official Website*-nya
4. Perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR berdasarkan pedoman GRI G4
5. Perusahaan yang ada pada industri keuangan yang beroperasi secara nasional.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penggunaan metode *Porpusive Sampling* diatas maka dapat ditentukan Bank yang akan menjadi sample dalam penelitian ini yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI.

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh (Zuldafrial, 2012; 46). Dalam sebuah penelitian, sumber data terbagi atas 2 bagian yaitu *Primary Data* (Data Primer), dan *Secondary Data* (Data Sekunder). Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, data yang didapat peneliti bisa dari hasil penelitian yang memiliki tujuan khusus yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, bisa diperoleh dari media perantara seperti catatan dari pihak lain, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang sudah ada dan telah tersusun dalam arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Banyak perusahaan perbankan sekarang yang sudah *go public* maka hal ini akan memudahkan peneliti untuk memperoleh sumber data dari website resmi masing-masing bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2019 dari masing-masing perusahaan perbankan yang menjadi sample penelitian ini yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting perannya dalam melakukan suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Sugiono (2009; 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiono (2009; 225) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *Natural Settings* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Menurut Riyanto (2010; 96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada melihat, mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kebiasaan, tindakan atau juga kegiatan (Sekaran & Bougie, 2013; 130). Menurut widoyoko (2014; 46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dari penjelasan para ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Manfaat dari metode observasi ialah :

1. Hasil observasi yang dihasilkan bisa dikonfirmasi dengan hasil penelitian
2. Deskripsi memberikan perkiraan dunia nyata.
3. Memungkinkan pembacanya mempunyai penafsiran individual akan penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan.

4. Bisa menjelaskan proses peristiwa terjadi dan bisa menguji kualitas, berspekulasi mengapa sesuatu terjadi dalam aturan nyatanya.
5. Dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya.
6. Mencatat keadaan yang tidak bisa direplikasikan dalam eksperimen.
7. Kronologi peristiwa bisa dicatat dengan berurutan.
8. Perlengkapan dan teknologi bisa merekam secara permanen.
9. Observasi bisa dikombinasikan dengan sistem lain.

Terdapat beberapa jenis observasi menurut Riyanto (2010; 98-100) :

1. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan ikut berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.

2. Observasi non Partisipan

Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observee.

3. Observasi Sistematis (*Structured Observation*)

Observasi sistematis, apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

4. Observasi non Sistematis

Observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan.

5. Observasi Eksperimental

Pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan kedalam suatu kondisi atau situasi tertentu.

Dalam penelitian ini jenis observasi yang penulis gunakan ialah jenis observasi non partisipan dan jenis observasi sistematis. Peneliti menggunakan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak turut serta dalam segala macam kegiatan yang dilakukan objek yang diteliti. Peneliti juga menggunakan observasi sistematis karena dalam penelitian ini menggunakan pedoman GRI G4 sebagai instrument pengamatan.

2. Studi Dokumen

Menurut Riyanto (2012; 103) Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Arikunto (2016; 158) adalah metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya. Dalam penelitian ini studi dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2019 dari masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian.

3. Pengumpulan Data Sekunder

Adapun data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Laporan Tahunann (*Annual Report*) Bank Mandiri Tahun 2019
2. Laporan Tahunann (*Annual Report*) Bank Danamon Tahun 2019
3. Laporan Tahunann (*Annual Report*) Bank BNI Tahun 2019
4. Laporan Tahunann (*Annual Report*) Bank BTN Tahun 2019
5. Laporan Tahunann (*Annual Report*) Bank BRI Tahun 2019

Penulis memperoleh data-data sekunder ini dari situs resmi masing-masing perusahaan yang bergerak diindustri perbankan.

3.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang penulis gunakan ialah analisis isi. Analisis isi merupakan metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi. Adapun tujuan dari penelitian dengan metode analisis ini ialah untuk menggambarkan karakteristik atau isi dari suatu pesan, dan digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks (Webber, 1994; 9). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi “ditiru” dan sah datanya dengan memerhatikan konteksnya (Krippendorff, 1980;21 & 1986; 8). Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan antara variabel, analisis ini semata-mata hanya untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan, yang dalam hal ini mengenai pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI G4 pada perusahaan perbankan.

Analisis isi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan Indonesia berdasarkan GRI G4 yaitu dengan memberikan skor pada setiap item GRI G4 yang diungkapkan. Metode skoring ini telah banyak digunakan dalam penelitian seperti teknik analisis ini telah digunakan oleh Widya dan Siti (2016).

1. Pemberian skor untuk setiap item GRI G4 yang digunakan. Adapun kriteria penilaian yang dilakukan ialah menggunakan skor dari 0 – 2, dimana:
 - a. Nilai 0 jika sama sekali tidak ada pengungkapan terkait item tersebut.
 - b. Nilai 1 digunakan jika ada pengungkapan tetapi tidak sempurna
 - c. Nilai 2 digunakan jika pengungkapan dilakukan dengan sangat baik

Secara total keseluruhan total kategori dan sub kategori GRI G4 adalah 176 item. Apabila kategori dan sub kategori diungkapkan secara sempurna atau penuh, maka nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 352.

2. Setelah memberikan skor pada masing-masing item yang terdapat pada laporan berkelanjutan sesuai dengan pedoman GRI G4. Selanjutnya dihitung tingkat pengungkapan atas item-item tersebut dengan cara membagi jumlah item pengungkapan yang dipenuhi dengan jumlah skor item maksimum 100%. Tingkat pengungkapan tersebut jika digambarkan dalam rumus adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\text{Jumlah Item pengungkapan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor item maksimum}} 100\%$$